

INDUSTRI & PERDAGANGAN

Perundingan Indonesia-Uzbekistan FTA Perkuat Akses Pasar ke Asia Tengah

Jakarta - Menteri Perdagangan RI Budi Santoso bersama Menteri Investasi, Industri, dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov meluncurkan perundingan perjanjian bebas antara Indonesia dan Uzbekistan (Indonesia-Uzbekistan FTA) secara daring.

"Kami berkomitmen agar proses perundingan berjalan efektif, transparan, dan menghasilkan perjanjian yang bermanfaat nyata," jelas Budi.

Budipun mengapresiasi Menteri Investasi, Industri, dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov untuk memperkuat potensi kedua negara dalam sebuah landasan kerja sama yang kokoh.

Di sisi lain, Kudratov menegaskan minat kuat Uzbekistan untuk meningkatkan kerja sama bilateral dengan Indonesia. "Kami melihat kemitraan bilateral menunjukkan perkembangan yang stabil dan positif. Nilai perdagangan dan investasi kita masih memiliki ruang yang sangat besar untuk ditingkatkan."

Indonesia-Uzbekistan FTA dan Peretujuan Kerja Sama Perdagangan dan Investasi (Agreement on Trade and Investment Cooperation) yang mulai kita persiapkan ini akan menjadi fondasi yang kuat bagi kemitraan yang lebih luas dan sistematis antara kedua negara," ujar Kudratov.

Kelompok Kerja Bersama Indonesia-Uzbekistan

Selain meluncurkan Perundingan Indonesia-Uzbekistan FTA, kedua menteri juga menandatangani Peretujuan Kerja Sama Perdagangan dan Investasi. Peretujuan tersebut akan membentuk Kelompok Kerja Bersama (Joint Working Group).

Kelompok kerja ini bertugas mengintensifkan pertukaran informasi, pengetahuan, dan keahlian teknis; mengidentifikasi dan mengimplementasi proyek kerja sama yang saling menguntungkan; serta menyelenggarakan program pelatihan bersama, pertemuan, dan seminar.

Harapannya, dengan Kelompok Kerja Bersama, Indonesia dan Uzbekistan memiliki mekanisme yang lebih terarah untuk mendorong realisasi kerja sama konkret, termasuk membuka peluang investasi dan memperkuat kolaborasi antarpelaku usaha.

Sementara itu, Kudratov menegaskan komitmen kuat Uzbekistan untuk memperlancar hubungan ekonomi bilateral. Ia mengusulkan agar Kelompok Kerja Bersama dapat bertemu secara rutin untuk memantau perkembangan implementasi kerja sama kedua negara.

Kudratov juga mengundang Mendag Busan untuk mengunjungi Uzbekistan dalam Pertemuan Intergovernmental Commission (IGC) yang direncanakan berlangsung pada Juni 2026, di Tashkent, Uzbekistan.

NERACA

Peluncuran ditandai dengan penandatanganan pernyataan bersama (joint statement) oleh keduanya secara daring melalui aplikasi konferensi video. Selain itu, keduanya menandatangani Peretujuan Kerja Sama Perdagangan dan Investasi (Agreement on Trade and Investment Cooperation).

"Peluncuran perundingan Indonesia-Uzbekistan FTA hari ini menandai langkah penting dalam memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara. Kami optimistis persetujuan ini akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Menteri Perdagangan Budi Santoso.

Inisiatif perundingan merefleksikan visi kedua negara dalam membangun kemitraan ekonomi yang semakin erat, terbuka, dan berkelanjutan di tengah dinamika perekonomian global.

Mendag Busan berharap, Indonesia-Uzbekistan FTA dapat membawa manfaat perluasan akses pasar bagi produk unggulan

kedua negeri, penguatan rantai nilai, serta terciptanya peluang nyata bagi dunia usaha termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Uzbekistan merupakan mitra strategis di Asia Tengah untuk meningkatkan konektivitas perdagangan regional dan global Indonesia. Posisi geografis Uzbekistan yang strategis berpotensi menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk menjangkau pasar yang lebih luas di kawasan.

Pada 2025, total perdagangan Indonesia-Uzbekistan tercatat mencapai USD 181,4 juta. Nilai ini tumbuh 48,9 persen dalam lima tahun terakhir (2021-2025), mencerminkan peningkatan kepercayaan komunitas pelaku usaha kedua negara. Pertumbuhan ini juga menegaskan pentingnya membangun kerangka kerja yang lebih terstruktur dalam memanfaatkan potensi yang ada.

Menurut Budi, Tim Perundingan Indonesia akan bekerja optimal dan konstruktif untuk menyelesaikan perundingan tepat waktu dengan tetap menjaga kepentingan nasional.



PENUTUPAN RANGKAIAN PROGRAM PENDAMPINGAN GIZI 2025 : Nestlé Indonesia menutup rangkaian Program Pendampingan Gizi 2025 bersama seluruh mitra lintas sektor yang berperan dalam pelaksanaannya; (dari kiri ke kanan) Ankur Mittal - Marketing Manager of PT Nestlé Indonesia, Faelasufa, S.I.P., M.PP - Ketua TP PKK Kabupaten Batang, Prof. Ali Khomsan - Guru Besar Pangan dan Gizi IPB, Amri Ilmma - Chief Operating Officer Yayasan Edu Farmers International, Dr. Yuni Hastutiningsih, SKM., M.Kes - Plt. Direktur Bina Peran Serta Masyarakat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Ketua Tim Kerja GENTING (Gerakan Orangtua Asuh Cegah Stunting), Fajar Dewantara, Director of Corporate Affairs PT Nestlé Indonesia, di Jakarta, Rabu (4/3).

NTP Februari 2026 Tembus 125,45

NERACA

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) Februari 2026 naik menjadi 125,45 atau meningkat 1,50 persen dibandingkan Januari 2026. Angka tersebut mencetak rekor baru dalam periode penghitungan NTP dan mencerminkan rasio harga yang diterima petani meningkat lebih cepat dibandingkan biaya yang dibayar.

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menyatakan capaian NTP tersebut menjadi tonggak penting dalam penguatan daya beli petani nasional, seiring rangkaian deregulasi, efisiensi anggaran, dan transformasi pertanian menuju sistem modern.

"Capaian ini menjadi rekor baru. Ini bukti kebijakan kita di lapangan mulai dirasakan langsung oleh petani," ujar Amran. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa kenaikan NTP terjadi karena Indeks Harga yang Diterima Petani (It) meningkat lebih tinggi dibandingkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib).

"Pada Februari 2026, NTP tercatat sebesar 125,45 atau naik 1,50 persen dibandingkan Januari 2026. Kenaikan ini menunjukkan bahwa secara umum

daya beli petani mengalami perbaikan," ujar Ateng. Dia merinci, I pada Februari 2026 tercatat sebesar 158,38 atau naik 2,17 persen dibandingkan sebelumnya. Beberapa komoditas yang memberikan andil terhadap kenaikan indeks harga yang diterima petani antara lain cabai rawit, karet, kelapa sawit, dan bawang merah.

"Sementara itu, Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) juga mengalami kenaikan sebesar 0,65 persen menjadi 126,24. Peningkatan ini antara lain dipengaruhi oleh naiknya harga cabai rawit, daging ayam ras, cabai merah, dan telur ayam ras," jelasnya.

Lebih lanjut, Ateng menyampaikan bahwa secara subsektor, sebagian besar mengalami kenaikan NTP. Subsektor hortikultura mencatat kenaikan tertinggi, dari 119,62 pada Januari menjadi 139,57 pada Februari 2026 atau naik 16,68 persen.

"Selain hortikultura, subsektor tanaman perkebunan rakyat naik 0,24 persen, peternakan naik 1,68 persen, dan perikanan naik 0,72 persen. Untuk perikanan, NTP nelayan naik 0,35 persen dan NTP pembudidaya ikan meningkat 1,32 persen," tambahnya.

Adapun subsektor tanaman pangan menjadi satu-satunya yang mengalami penurunan, dari

113,43 pada Januari menjadi 112,43 pada Februari 2026 atau turun 0,88 persen. Secara umum, perkembangan NTP Februari 2026 menunjukkan tren positif bagi sektor pertanian nasional, sekaligus memperkuat optimisme terhadap keberlanjutan peningkatan kesejahteraan petani.

Sebelumnya, sektor pertanian nasional menutup tahun 2025 dengan capaian yang juga cukup baik NTP pada Desember 2025 tercatat sebesar 125,35, atau meningkat 1,05 persen dibandingkan November 2025. Capaian ini menegaskan semakin membaiknya kesejahteraan rumah tangga pertanian di seluruh Indonesia.

Kenaikan NTP ini terjadi karena Indeks Harga yang Diterima Petani (It) melonjak sebesar 2,08 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang hanya 1,02 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa posisi tawar petani semakin menguat dan usaha pertanian semakin menguntungkan.

Lonjakan NTP Desember 2025 terutama didorong oleh kinerja impresif subsektor hortikultura yang mencatat kenaikan NTP sangat signifikan sebesar 14,48 persen. Selain itu, komoditas lain juga tercatat memengaruhi pen-

ingkatan, mulai dari gabah, cabai rawit, kakao, dan ayam ras pedaging.

Selain itu, secara kumulatif, sepanjang Januari-Desember 2025, NTP nasional mencapai 123,26, atau meningkat 3,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Angka ini mencerminkan konsistensi kinerja sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama penopang perekonomian nasional, bahkan di tengah berbagai tantangan ekonomi global.

Secara wilayah, capaian positif NTP terjadi di 38 provinsi mencatat kenaikan NTP, dengan Provinsi Gorontalo menjadi yang tertinggi secara nasional, naik 5,60 persen di bulan Desember. Capaian ini menunjukkan bahwa penguatan sektor pertanian tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga dirasakan nyata hingga ke daerah.

Secara keseluruhan, lonjakan NTP pada Desember 2025 menjadi bukti nyata bahwa sektor pertanian Indonesia semakin tangguh, produktif, dan menguntungkan.

Kementerian Pertanian akan terus memperkuat kebijakan yang berpihak pada petani, menjaga stabilitas harga, meningkatkan produktivitas, serta memastikan pertanian fondasi utama pangan. ●



PENGAWASAN PANGAN : Petugas Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten melakukan uji kandungan pada ikan di dalam mobil laboratorium keliling di Pasar Induk Rau, Kota Serang, Banten, Selasa (3/3/2026). Pengawasan pangan tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dari peredaran bahan berbahaya selama bulan Ramadhan dengan hasil temuan tiga jenis pangan mengandung formalin dan pewarna tekstil (Rhodamin B) dari 33 sampel yang diuji.

Sidak Pasar untuk Stabilitas Pangan Ramadhan

NERACA

Semarang - Direktur Utama Perum BULOG, Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Jawa Tengah.

Rizal turun langsung memantau harga sejumlah komoditas strategis. Hasil pemantauan menunjukkan harga bahan pokok relatif stabil dan masih berada dalam batas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Rizal menegaskan bahwa pengendalian harga pangan bukan hal baru bagi BULOG. Ia menyebut pengalaman menjaga stabilitas harga pada momentum

hari besar keagamaan sebelumnya menjadi bekal penting dalam mengawal Ramadhan tahun ini.

"Diharapkan selama Ramadhan dan saat Idulfitri nanti kondisi juga tetap stabil. Kami ingin memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang wajar dan sesuai ketentuan," ujar Rizal.

Rizal menambahkan, monitoring akan terus diintensifkan sepanjang Ramadhan 2026 guna memastikan kecukupan stok dan stabilitas harga tetap terjaga. BULOG juga memastikan persediaan komoditas pangan strategis dalam kondisi aman dan mencukupi hingga Idul Fitri.

Sebagai bagian dari penguatan pengawasan, pemerintah melalui Kement-

rian Perdagangan telah memasang daftar harga kebutuhan pokok sebagai acuan bagi pedagang dan konsumen.

Daftar tersebut juga menjadi instrumen kontrol bagi Satgas Pangan untuk mencegah pelanggaran HET di lapangan.

"Selain memantau, kami juga turut melakukan sosialisasi kepada pedagang agar tetap menjual komoditas sesuai aturan yang berlaku serta menjaga ekosistem perdagangan yang sehat dan kondusif, tanpa merugikan konsumen maupun pelaku usaha," jelas Rizal.

Upaya pengendalian stabilitas pangan juga dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi

Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan bahwa hasil sidak di sejumlah kota besar menunjukkan tren harga yang stabil.

"Saya rasa semua pangan pokok stabil. Stok aman. Walau memang (harga) bervariasi, tapi kecenderungannya kita lihat sudah mulai stabil dan menurun," ujarnya.

Bapanas bersama Satgas Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan juga melakukan sidak di Jakarta dan Palembang.

Hasilnya, sebagian besar harga komoditas strategis masih berada dalam rentang HET dan Harga Acuan Penjualan (HAP). Sehingga dengan sidak harga di pasar stabil. ●

NERACA

Jakarta - Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menargetkan percepatan pembangunan fisik untuk Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih sebagai upaya untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.

Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menkop menekankan bahwa kelancaran pembangunan fisik Kopdes Merah Putih sangat krusial untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan pemberdayaan ekonomi rakyat di tingkat desa.

"Kami memahami adanya keterbatasan lahan di beberapa desa dan kelurahan. Oleh karena itu, kami akan segera menyesuaikan spesifikasi pembangunan fisik koperasi agar bisa lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi lokal," ujar Ferry dalam Rakortas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta.

Sebagai upaya men-

gatasi masalah tersebut, Kemenkop berencana untuk mengeluarkan kebijakan customized design untuk koperasi yang dibangun di desa dengan keterbatasan luas lahan. Kebijakan ini akan diteruskan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara, sebagai pelaksanaan pembangunan fisik gedung Kopdes Merah Putih.

Hal ini dilakukan agar pembangunan fisik tetap dapat memenuhi standar yang ditetapkan, meskipun dengan adanya keterba-

atasan fisik yang berbeda di tiap wilayah.

Berdasarkan data yang dihimpun pada Command Center Kemenkop, sebanyak 48.734 lahan sudah dilakukan pemetaan.

Kemudian ada sebanyak 30.336 titik yang sedang dilakukan pembangunan fisik. Dari total angka tersebut, yang telah rampung 100% adalah sebanyak 1.135 titik.

Hadir dalam rapat Menteri Desa dan Pembangunan daerah tertinggal Yandri Susanto. ●

Manulife Investments

PENGUMUMAN PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DAN PROSPEKTUS REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II

Menindaklanjuti rencana perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang telah diumumkan dalam surat kabar "Harian Ekonomi Neraca" pada tanggal 9 Februari 2026, kami, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II, dengan ini mengumumkan bahwa perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II telah selesai dilaksanakan.

Prospektus dari REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II terkait perubahan di atas akan tersedia pada situs Manajer Investasi yaitu www.manulifeinvestor.com. Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Customer Service MAMI di (021) 2552255

Jakarta, 5 Maret 2026
Manajer Investasi
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PENGUMUMAN PENURUNAN MODAL DASAR, DITEMPAHKAN, DAN DISETOR PT PRIME AGRI MATERIALS

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT Prime Agri Materials, berkedudukan di Sampoerna Strategic Square, North Tower, 28/F, Jalan Jenderal Sudirman Kav.45, Jakarta Indonesia 12930 ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 4 Maret 2026 telah memutuskan sebagai berikut :

Penurunan Modal Dasar Perseroan yang semula Rp.1.510.386.498.000 (satu triliun lima ratus sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp1.191.360.000.000, (satu triliun seratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah) serta Penurunan Modal Ditempahtkan dan Disetor yang semula Rp.1.510.386.498.000 (satu triliun lima ratus sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp1.191.360.000.000, (satu triliun seratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah).

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau keberatan atas keputusan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Perseroan dengan mencantumkan alasannya, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini.

Jakarta, 5 Maret 2026
Direksi PT Prime Agri Materials

rekса dаnа **mandiri** **investasi**

PENGUMUMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN PROSPEKTUS REKSA DANA INDEKS MANDIRI ETF SRI-KEHATI

Menindaklanjuti rencana perubahan Prospektus REKSA DANA INDEKS MANDIRI ETF SRI-KEHATI yang telah diumumkan melalui surat kabar "Harian Ekonomi Neraca" tertanggal 10 Februari 2026, kami, PT Mandiri Manajemen Investasi, berkedudukan di Jakarta, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA INDEKS MANDIRI ETF SRI-KEHATI, dengan ini mengumumkan bahwa telah dilaksanakannya perubahan Prospektus REKSA DANA INDEKS MANDIRI ETF SRI-KEHATI.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS MANDIRI ETF SRI-KEHATI serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 5 Maret 2026
Manajer Investasi,
PT Mandiri Manajemen Investasi
Menara Mandiri II, lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55
Jakarta 12190
Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

BRI **reksа dаnа**

Manajemen Investasi

PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA BRI GEBYAR DANA LIKUID II

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif"), PT BRI MANAJEMEN INVESTASI selaku Manajer Investasi REKSA DANA BRI GEBYAR DANA LIKUID II ("BRI GEBYAR DANA LIKUID II") dengan ini mengumumkan rencana pembubaran dan likuidasi BRI GEBYAR DANA LIKUID II.

Pembubaran BRI GEBYAR DANA LIKUID II wajib dilakukan sehubungan dengan terpecahnya kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Pasal 24.1 butir (iii) Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BRI GEBYAR DANA LIKUID II, menyatakan bahwa BRI GEBYAR DANA LIKUID II wajib dibubarkan apabila total Nilai Aktiva Bersih BRI GEBYAR DANA LIKUID II kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut.

Berkaitan dengan rencana tersebut di atas, pada tanggal yang sama dengan pengumuman ini Manajer Investasi telah menyampaikan rencana pembubaran dan likuidasi BRI GEBYAR DANA LIKUID II kepada Otoritas Jasa Keuangan, serta mengintruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BRI GEBYAR DANA LIKUID II.

Pembubaran dan dimulainya proses likuidasi akan dilakukan dengan ditandatanganinya Akta Pembubaran dan Likuidasi BRI GEBYAR DANA LIKUID II di hadapan Notaris.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.

Jakarta, 5 Maret 2026
Manajer Investasi selaku likuidator
REKSA DANA BRI GEBYAR DANA LIKUID II
PT BRI MANAJEMEN INVESTASI